



Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan

Fresyam Antika Ajeng

Universitas Islam Lampung, Indonesia

fresyamantikaajeng@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.918>

Abstract

This study examines how mass media function as an ideological apparatus in representing Muslims and producing citizenship identity in Indonesia. Employing a qualitative approach within a critical paradigm and Fairclough's Critical Discourse Analysis model, the research analyzes selected national online media coverage addressing Islamic-related socio-political issues. The findings reveal four dominant representational patterns: securitization, normative moderation, politicization of identity, and commodification of religiosity. These patterns not only shape public images of Muslims but also interpellate them into selective and conditional forms of citizenship. The media construct a symbolic standard of the "ideal" Muslim citizen moderate, stable, and compatible with market logic while positioning alternative expressions of religious identity in ambivalent or problematic terms. The study demonstrates that citizenship is not merely a legal-formal status but is discursively produced through media representation. This research contributes to media and citizenship studies by highlighting representation as a mechanism of subject formation within contemporary democracy.

Keywords: Muslim Representation, Ideological Apparatus, Citizenship Identity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media massa berfungsi sebagai aparatus ideologis dalam merepresentasikan Muslim dan memproduksi identitas kewarganegaraan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma kritis dan Analisis Wacana Kritis model Fairclough, penelitian ini mengkaji sejumlah pemberitaan media daring nasional yang memuat isu-isu keislaman dalam konteks sosial-politik tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi Muslim dibentuk melalui empat pola dominan, yakni securitization, moderasi normatif, politisasi identitas, dan komodifikasi religiusitas. Pola-pola tersebut tidak hanya membingkai citra Muslim, tetapi juga menginterpelasi mereka ke dalam tipe kewarganegaraan tertentu yang bersifat selektif dan kondisional. Media memproduksi standar simbolik tentang Muslim ideal yakni yang moderat, stabil, dan kompatibel dengan logika pasar sementara ekspresi identitas yang dianggap menyimpang cenderung diposisikan secara ambivalen. Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak hanya ditentukan secara legal-formal, tetapi juga dikonstruksi secara diskursif melalui praktik representasi media. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian media dan studi kewarganegaraan dengan menempatkan representasi sebagai mekanisme produksi subjek kewargaan dalam demokrasi kontemporer.

Keywords: Representasi Muslim, Aparatus Ideologis, Identitas Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Perkembangan media massa dalam lanskap demokrasi kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai medium penyampai informasi, melainkan sebagai institusi sosial yang berperan aktif dalam memproduksi makna, membentuk opini publik, dan mengonstruksi identitas kolektif. Media bukan ruang netral; ia adalah arena ideologis tempat nilai, kepentingan, dan relasi kuasa dinegosiasikan serta direproduksi secara terus-menerus. Dalam konteks masyarakat yang plural dan religius seperti Indonesia, representasi tentang Islam dan Muslim di media massa menjadi isu strategis, sebab ia tidak hanya menyangkut citra keagamaan, tetapi juga berdampak pada konstruksi identitas kewarganegaraan. Dengan kata lain, cara media menggambarkan Muslim turut menentukan bagaimana Muslim diposisikan sebagai warga negara apakah sebagai subjek yang setara, sebagai kelompok yang dicurigai, atau sebagai simbol moralitas publik.

Secara teoretis, gagasan bahwa media berfungsi sebagai aparatus ideologis dapat ditelusuri pada pemikiran Louis Althusser mengenai *Ideological State Apparatuses* (ISA). Althusser menegaskan bahwa ideologi bekerja melalui institusi-institusi sosial termasuk media yang “menginterpelasi” individu sebagai subjek tertentu.¹ Melalui proses interpelasi tersebut, individu menerima posisi identitas yang telah dikonstruksikan dalam struktur ideologis tertentu. Dalam konteks ini, representasi Muslim dalam media tidak sekadar refleksi realitas sosial, melainkan hasil produksi wacana yang memanggil Muslim ke dalam kategori-kategori tertentu: moderat, radikal, nasionalis, eksklusif, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas negara. Perspektif ini menegaskan bahwa representasi adalah praktik ideologis yang membentuk kesadaran kewargaan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori representasi Stuart Hall yang menyatakan bahwa makna tidak hadir secara alamiah dalam objek, melainkan diproduksi melalui sistem tanda dan praktik diskursif. Media berfungsi sebagai mekanisme produksi dan sirkulasi makna yang membentuk cara publik memahami suatu kelompok sosial. Representasi, menurut Hall, bukan sekadar deskripsi, melainkan konstruksi yang melibatkan seleksi, *framing*, dan artikulasi makna dalam konteks relasi kuasa.² Dalam konteks Muslim, representasi dapat mengambil bentuk stereotipisasi, simplifikasi, maupun diferensiasi simbolik yang berdampak pada pembentukan persepsi publik tentang posisi sosial dan politik mereka.

Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa representasi Muslim di media Barat kerap diwarnai oleh narasi keamanan (*security discourse*) dan asosiasi dengan kekerasan atau radikalisme.³ Studi Poole menemukan bahwa media Inggris secara konsisten membingkai Islam dalam konteks konflik dan ekstremisme, sehingga membentuk citra

¹ Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation),” dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*, trans. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 1971), h. 160–170

² Stuart Hall, “The Work of Representation,” dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: Sage Publications, 1997), h. 15–30.

³ Edward W. Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, rev. ed. (New York: Vintage Books, 1997), h. 3–26.

kolektif yang problematis.⁴ Demikian pula, Said dalam kerangka Orientalism menegaskan bahwa media Barat cenderung mereproduksi konstruksi Timur sebagai “yang lain” yang inferior dan berbahaya.⁵ Representasi semacam ini berimplikasi pada marginalisasi Muslim sebagai warga negara dalam masyarakat multikultural.⁶

Dalam konteks Indonesia, dinamika representasi Muslim memiliki kompleksitas tersendiri. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Islam tidak berada dalam posisi minoritas struktural. Namun demikian, media tetap memainkan peran signifikan dalam membingkai berbagai isu keislaman, mulai dari radikalisme, gerakan hijrah, politik identitas, hingga komodifikasi simbol religius. Penelitian Eriyanto mengenai analisis *framing* menunjukkan bahwa media di Indonesia memiliki kecenderungan ideologis tertentu dalam membingkai isu-isu keagamaan dan politik.⁷ Studi lain oleh Heryanto mengungkap bahwa politik identitas dalam ruang publik Indonesia semakin dimediasi oleh media, terutama dalam momentum elektoral, sehingga identitas keagamaan kerap dipolitisasi.⁸

Lebih lanjut, penelitian Tapsell tentang oligarki media di Indonesia menunjukkan bahwa kepemilikan media yang terpusat pada elite politik-ekonomi berdampak pada independensi pemberitaan.⁹ Struktur kepemilikan tersebut memungkinkan produksi wacana yang selaras dengan kepentingan politik tertentu. Dalam situasi demikian, representasi Muslim tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kuasa ekonomi dan politik yang mengendalikan industri media. Artinya, representasi bukan sekadar persoalan jurnalistik, melainkan bagian dari strategi ideologis yang lebih luas.

Di sisi lain, perkembangan media digital dan media daring memperluas arena produksi identitas. Media sosial dan portal berita daring memungkinkan reproduksi wacana yang lebih cepat dan masif. Penelitian Lim menunjukkan bahwa ruang digital di Indonesia menjadi arena pertarungan wacana keagamaan dan politik yang intens, terutama dalam konteks mobilisasi identitas Islam.¹⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa media bukan hanya cermin realitas sosial, melainkan agen aktif dalam membentuk identitas kolektif dan solidaritas politik.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek *framing*, bias pemberitaan, atau dampak politik identitas secara umum. Kajian yang secara eksplisit menempatkan media sebagai aparatus ideologis dalam kerangka produksi identitas

⁴ Elizabeth Poole, *Reporting Islam: Media Representations of British Muslims* (London: I.B. Tauris, 2002), h. 45–72.

⁵ Edward W. Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, rev. ed. (New York: Vintage Books, 1997), h. 3–26.

⁶ Tariq Modood dan Nasar Meer, “Refutations of Racism in the ‘Muslim Question’,” *Patterns of Prejudice* 43, no. 3–4 (2009): h. 335–354.

⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 65–88.

⁸ Ariel Heryanto, *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture* (Singapore: NUS Press, 2015), h. 17–42.

⁹ Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* (Lanham, MD: Rowman S Littlefield, 2017), h. 23–49.

¹⁰ Merlyna Lim, “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia,” *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (2017): h. 411–427.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

kewarganegaraan masih relatif terbatas. Banyak studi membahas representasi Muslim dalam konteks stereotip atau islamofobia, tetapi belum secara sistematis mengaitkannya dengan konsep interpelasi ideologis dan konstruksi kewarganegaraan. Padahal, isu kewarganegaraan sangat relevan dalam demokrasi modern, di mana status sebagai warga negara tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh pengakuan simbolik dan legitimasi sosial.¹¹

Konsep kewarganegaraan sendiri mengalami transformasi signifikan dalam era globalisasi dan *mediatization*. Kymlicka menekankan pentingnya pengakuan identitas kultural dalam kerangka kewarganegaraan multikultural.¹² Sementara itu, Marshall menguraikan dimensi sipil, politik, dan sosial dalam kewarganegaraan modern.¹³ Dalam konteks masyarakat religius, identitas keagamaan menjadi salah satu dimensi penting yang berinteraksi dengan status kewargaan. Representasi Muslim di media berpotensi memperkuat atau justru melemahkan pengakuan terhadap hak-hak kewarganegaraan tersebut.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan secara kritis adalah: bagaimana media memproduksi tipe kewarganegaraan tertentu melalui representasi Muslim? Apakah Muslim direpresentasikan sebagai warga negara yang sepenuhnya loyal dan partisipatif, ataukah sebagai kelompok yang harus terus-menerus membuktikan nasionalismenya? Di sinilah relevansi pendekatan aparatus ideologis menjadi signifikan. Media, melalui praktik diskursifnya, dapat menginterpelasi Muslim sebagai subjek yang “patuh” pada definisi kewarganegaraan dominan, atau sebaliknya, sebagai subjek yang berada dalam posisi ambivalen.

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan kecenderungan ambivalensi tersebut. Studi Hamayotsu tentang Islam dan demokrasi di Indonesia mengindikasikan adanya ketegangan antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan dalam diskursus publik.¹⁴ Sementara itu, penelitian Mietzner dan Muhtadi menunjukkan bahwa politisasi identitas Islam dalam kontestasi politik berdampak pada polarisasi sosial.¹⁵ Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit menelaah bagaimana media sebagai institusi ideologis berperan dalam memproduksi bentuk kewarganegaraan yang terpolarisasi.

Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini. Penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi pola representasi, tetapi melangkah lebih jauh dengan menganalisis mekanisme ideologis yang bekerja di balik representasi tersebut serta implikasinya terhadap produksi identitas kewarganegaraan. Dengan menggunakan kerangka aparatus ideologis Althusser dan teori representasi Hall, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana media

¹¹ Engin F. Isin dan Bryan S. Turner, *Handbook of Citizenship Studies* (London: Sage Publications, 2002), h. 1–10.

¹² Will Kymlicka, *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 17–36.

¹³ T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class and Other Essays* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), h. 10–28.

¹⁴ Kikue Hamayotsu, “The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance,” *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): h. 658–677

¹⁵ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation,” *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): h. 479–497

mengonstruksi Muslim sebagai subjek kewargaan tertentu melalui praktik wacana yang sistematis.

Pendekatan ini penting karena dalam demokrasi modern, legitimasi kewarganegaraan tidak hanya bersumber pada konstitusi, tetapi juga pada pengakuan simbolik dalam ruang publik. Jika media secara konsisten merepresentasikan Muslim dalam kerangka tertentu misalnya sebagai ancaman keamanan atau sebagai komoditas religius maka representasi tersebut berpotensi membentuk persepsi kolektif tentang posisi Muslim dalam struktur kebangsaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kohesi sosial dan kualitas demokrasi.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media berfungsi sebagai aparatus ideologis dalam merepresentasikan Muslim dan bagaimana representasi tersebut berkontribusi pada produksi identitas kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada kajian media dan studi Islam, sekaligus menawarkan refleksi kritis tentang peran media dalam memperkuat atau melemahkan kewarganegaraan inklusif.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pola representasi Muslim dalam media massa? dan (2) Bagaimana media sebagai aparatus ideologis memproduksi identitas kewarganegaraan melalui representasi tersebut? Dengan menjawab pertanyaan ini, artikel ini berupaya mengisi kekosongan analitis dalam studi representasi Muslim di Indonesia dan memberikan kerangka konseptual yang lebih integratif antara teori ideologi, representasi, dan kewarganegaraan.

Akhirnya, dalam konteks global yang ditandai oleh meningkatnya politik identitas dan fragmentasi sosial, refleksi kritis terhadap peran media menjadi semakin mendesak. Tanpa kesadaran terhadap fungsi ideologis media, masyarakat berisiko menerima representasi sebagai realitas yang *taken for granted*. Oleh karena itu, analisis yang tajam dan sistematis terhadap representasi Muslim sebagai bagian dari produksi identitas kewarganegaraan merupakan langkah strategis untuk memahami dinamika demokrasi kontemporer secara lebih komprehensif dan reflektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, yang memandang media bukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai institusi yang berperan dalam produksi dan reproduksi ideologi. Kerangka analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK), dengan merujuk pada model tiga dimensi Fairclough, yang mencakup analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.¹⁶ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran relasi antara struktur bahasa, proses produksi wacana, dan konteks ideologis yang melingkupinya.

¹⁶ Norman Fairclough, *Media Discourse*. (London: Edward Arnold, 1995), h. 55–75.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

Objek penelitian berupa konten pemberitaan tentang Muslim dalam media massa nasional berbasis daring yang memiliki jangkauan luas dan pengaruh signifikan terhadap opini publik. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap artikel berita, tajuk rencana, dan opini yang memuat isu keislaman dalam periode tertentu yang relevan dengan dinamika sosial-politik (misalnya momentum politik atau isu radikalisme). Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* berdasarkan intensitas dan relevansi pemberitaan.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi struktur tekstual, meliputi diksi, metafora, strategi *framing*, dan pola narasi; (2) analisis praktik diskursif, mencakup sumber narasi, otoritas wacana, serta pola distribusi informasi; dan (3) interpretasi praktik sosial, yaitu mengaitkan temuan tekstual dengan konteks ideologis, relasi kuasa, serta implikasinya terhadap konstruksi identitas kewarganegaraan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teori dan pembacaan berulang (*literative reading*) untuk memastikan konsistensi interpretasi. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran bagaimana representasi Muslim diproduksi secara sistematis dan bagaimana media berfungsi sebagai aparatus ideologis dalam membentuk subjek kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis wacana kritis terhadap sejumlah pemberitaan media massa nasional berbasis daring dalam periode yang ditentukan, ditemukan bahwa representasi Muslim dibentuk melalui pola-pola diskursif yang konsisten dan terstruktur. Pola tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan mekanisme ideologis yang lebih luas dalam produksi identitas kewarganegaraan. Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui dua fokus utama: (1) pola representasi Muslim dalam media massa, dan (2) bagaimana media berfungsi sebagai aparatus ideologis dalam memproduksi identitas kewarganegaraan.

Pola Representasi Muslim dalam Media Massa

Pada level tekstual, representasi Muslim dalam media menunjukkan kecenderungan pembingkaihan yang dapat diklasifikasikan ke dalam empat pola dominan: representasi *securitization* (keamanan), representasi moderasi normatif, representasi politisasi identitas, dan representasi kultural-komodifikatif.

Pertama, pola *securitization* muncul secara signifikan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan isu radikalisme, terorisme, atau intoleransi. Dalam pola ini, simbol dan istilah keislaman kerap hadir berdampingan dengan diksi yang menandai ancaman, seperti “radikal”, “jaringan ekstrem”, “doktrin tertutup”, atau “kelompok garis keras”. Struktur narasi umumnya menempatkan aparat negara atau otoritas keamanan sebagai aktor utama, sementara individu atau kelompok Muslim yang diberitakan berada dalam posisi objek pengawasan atau penindakan.

Analisis terhadap struktur kalimat menunjukkan dominasi bentuk pasif ketika menyebut kelompok Muslim dalam konteks negatif, sehingga identitas kolektif tampak

menyatu dengan tindakan yang dinarasikan. Dalam beberapa teks, simbol keagamaan seperti atribut pakaian atau istilah religius ditonjolkan meskipun tidak selalu relevan dengan substansi peristiwa. Strategi ini memperkuat asosiasi simbolik antara identitas Islam dan isu keamanan.

Namun yang menarik, *securitization* dalam konteks Indonesia tidak selalu menggeneralisasi seluruh komunitas Muslim. Terdapat upaya diskursif untuk membedakan antara “Muslim moderat” dan “Muslim radikal”. Dengan demikian, media tidak memproduksi oposisi Islam versus negara, melainkan membentuk dikotomi internal dalam tubuh umat Islam. Pola ini menunjukkan bahwa representasi tidak bersifat homogen, tetapi selektif dan hierarkis.

Kedua, pola moderasi normatif muncul dalam pemberitaan tentang program deradikalisasi, dialog lintas agama, atau peran organisasi Islam arus utama. Dalam pola ini, Muslim direpresentasikan sebagai aktor yang mendukung stabilitas nasional, toleransi, dan harmoni sosial. Diksi yang digunakan cenderung positif, seperti “inklusif”, “*rahmatan lil ‘alamin*”, “pilar kebangsaan”, dan “mitra strategis pemerintah”.

Struktur narasi dalam pola ini sering menampilkan tokoh agama yang dianggap representatif sebagai suara otoritatif. Identitas Muslim diposisikan sebagai kompatibel dengan nilai-nilai kebangsaan. Namun, representasi ini tidak sepenuhnya bebas dari muatan ideologis. Moderasi dipresentasikan sebagai standar normatif kewarganegaraan, sehingga Muslim yang berada di luar kategori tersebut secara implisit ditempatkan sebagai subjek yang perlu dibina atau diawasi.

Ketiga, pola politisasi identitas terlihat dalam pemberitaan yang berkaitan dengan momentum elektoral atau mobilisasi massa berbasis agama. Dalam konteks ini, simbol-simbol Islam kerap dikaitkan dengan istilah seperti “polarisasi”, “politik identitas”, atau “ancaman terhadap persatuan”. Media sering menekankan potensi fragmentasi sosial akibat penggunaan identitas keagamaan dalam kontestasi politik.

Analisis struktur wacana menunjukkan bahwa representasi ini membingkai partisipasi politik berbasis identitas Islam sebagai fenomena yang problematik, bahkan ketika praktik tersebut berada dalam kerangka demokrasi prosedural yang sah. Dengan demikian, Muslim sebagai aktor politik religius sering ditempatkan dalam posisi ambivalen: diakui haknya sebagai warga negara, tetapi sekaligus dicurigai legitimasi motifnya.

Keempat, pola kultural-komodifikatif muncul dalam pemberitaan tentang tren hijrah, industri busana Muslim, selebritas religius, atau gaya hidup Islami. Dalam pola ini, Islam direpresentasikan sebagai identitas kultural yang modern, modis, dan kompatibel dengan logika pasar. Diksi yang digunakan cenderung ringan dan afirmatif, menekankan aspek inspiratif dan transformasional.

Dalam struktur ini, identitas Muslim diposisikan sebagai bagian dari ekonomi simbolik yang menguntungkan. Religiusitas tidak diperlakukan sebagai potensi ancaman, melainkan sebagai komoditas yang dapat dipasarkan. Pola ini menunjukkan adanya integrasi antara kapitalisme media dan simbol keagamaan, di mana Islam direduksi menjadi elemen gaya hidup yang konsumtif.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

Keempat pola tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam praktik diskursif media. Satu isu dapat memunculkan dua atau lebih pola representasi sekaligus, tergantung pada konteks sosial-politik dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Media sebagai Aparatus Ideologis dalam Memproduksi Identitas Kewarganegaraan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola representasi di atas tidak sekadar menggambarkan Muslim, tetapi memproduksi tipe kewarganegaraan tertentu melalui mekanisme interpelasi ideologis. Media, dalam hal ini, berfungsi sebagai aparatus ideologis yang “memanggil” individu Muslim untuk mengidentifikasi diri dengan kategori kewargaan yang telah distandardisasi.

Pertama, dalam pola *securitization*, Muslim diinterpelasi sebagai subjek yang harus membuktikan loyalitasnya terhadap negara. Identitas kewarganegaraan yang diproduksi adalah kewargaan defensif, yakni posisi di mana Muslim secara implisit ditempatkan dalam relasi pengawasan. Meskipun tidak semua Muslim diasosiasikan dengan radikalisme, konstruksi diskursif tersebut menciptakan atmosfer kewaspadaan kolektif. Dengan demikian, kewarganegaraan Muslim tidak sepenuhnya diasumsikan sebagai *given*, melainkan sebagai sesuatu yang perlu diverifikasi melalui sikap moderat dan nasionalis.

Kedua, dalam pola moderasi normatif, media memproduksi model kewarganegaraan integratif. Muslim yang memenuhi kriteria moderasi direpresentasikan sebagai warga negara ideal. Namun, integrasi ini bersifat kondisional. Moderasi tidak diposisikan sebagai pilihan etis, melainkan sebagai prasyarat legitimasi sosial. Dengan kata lain, media menetapkan standar normatif tentang bagaimana menjadi Muslim sekaligus warga negara yang baik.

Ketiga, dalam pola politisasi identitas, media memproduksi kewarganegaraan depolitisasi. Partisipasi politik berbasis agama direpresentasikan sebagai ancaman terhadap harmoni nasional, sehingga Muslim yang terlibat dalam mobilisasi identitas ditempatkan dalam posisi ambivalen. Kewarganegaraan yang diidealkan adalah kewargaan yang menahan ekspresi identitas religius dalam ruang politik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa batas antara hak politik dan stabilitas nasional ditentukan melalui praktik diskursif media.

Keempat, dalam pola kultural-komodifikatif, media memproduksi kewarganegaraan konsumtif. Muslim diposisikan sebagai subjek ekonomi yang partisipatif dalam pasar simbolik. Identitas religius diterima sejauh tidak mengganggu logika kapitalisme dan stabilitas sosial. Kewarganegaraan yang diproduksi dalam pola ini adalah kewargaan yang kompatibel dengan konsumsi dan industri kreatif.

Secara keseluruhan, media tidak sekadar merefleksikan dinamika sosial, melainkan mengatur batas-batas kewarganegaraan melalui produksi makna. Identitas Muslim yang diakui sebagai sah adalah identitas yang sesuai dengan norma dominan yang dikonstruksi media. Proses ini berlangsung melalui seleksi isu, penentuan narasumber, penggunaan diksi, serta *framing* naratif yang berulang.

Analisis praktik diskursif juga menunjukkan bahwa otoritas negara dan elite politik-

ekonomi memiliki posisi dominan dalam menentukan arah representasi. Sumber resmi lebih sering dikutip dibandingkan suara komunitas akar rumput. Pola ini memperlihatkan relasi kuasa dalam produksi wacana, di mana legitimasi kewarganegaraan didefinisikan dari atas ke bawah.

Lebih jauh, ambivalensi dalam representasi menunjukkan bahwa media beroperasi dalam ketegangan antara tuntutan pasar, kepentingan politik, dan ideal demokrasi. Pada satu sisi, media menampilkan narasi inklusif tentang Islam sebagai bagian integral bangsa. Pada sisi lain, media juga memperkuat diferensiasi internal yang memisahkan “Muslim ideal” dan “Muslim problematik”. Ketegangan ini menjadi ciri khas produksi identitas kewarganegaraan dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media massa berfungsi sebagai aparatus ideologis yang secara sistematis memproduksi dan mereproduksi identitas kewarganegaraan Muslim melalui pola representasi yang terstruktur. Representasi bukan sekadar persoalan citra, melainkan mekanisme pembentukan subjek kewargaan yang memiliki implikasi sosial dan politik yang luas.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa representasi Muslim dalam media massa tidak dapat dipahami sebagai fenomena linguistik semata, melainkan sebagai praktik ideologis yang terhubung langsung dengan produksi identitas kewarganegaraan. Jika pada bagian hasil telah dipaparkan pola-pola representasi yang dominan, maka pada bagian ini pembahasan diarahkan pada interpretasi kritis atas mekanisme ideologis yang bekerja di balik pola tersebut, serta kontribusi temuan ini terhadap pengembangan kajian media, Islam, dan kewarganegaraan.

Dalam kerangka Althusser, ideologi bekerja melalui proses interpelasi, yakni ketika individu “dipanggil” untuk mengenali dirinya dalam kategori tertentu yang telah disediakan oleh struktur ideologis.¹⁷ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media massa berfungsi efektif sebagai aparatus ideologis yang menjalankan proses tersebut. Muslim tidak sekadar digambarkan, tetapi dipanggil untuk menempati posisi subjek tertentu: Muslim moderat, Muslim radikal, Muslim politis, atau Muslim kultural.

Pola *securitization*, misalnya, tidak hanya menghasilkan wacana tentang ancaman, tetapi membentuk kesadaran kolektif bahwa identitas Muslim berada dalam relasi konstan dengan isu keamanan. Bahkan ketika pemberitaan menyatakan bahwa radikalisme hanya dilakukan oleh segelintir oknum, struktur narasi yang berulang tetap menciptakan asosiasi simbolik antara Islam dan potensi deviasi. Di sini, interpelasi berlangsung secara halus: Muslim yang “baik” adalah mereka yang secara eksplisit menolak radikalisme dan menyatakan loyalitas kebangsaan. Loyalitas tersebut tidak diasumsikan sebagai sesuatu yang inheren, melainkan sebagai sikap yang harus ditunjukkan.

¹⁷ Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation),” dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*, trans. Ben Brewster (New York: Monthly Review Press, 1971), h. 170–177.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

Dalam konteks ini, temuan penelitian memperluas kajian Poole yang menunjukkan kecenderungan *securitization* dalam media Barat.¹⁸ Perbedaannya, dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, interpelasi tidak diarahkan untuk mengasingkan Muslim sebagai “yang lain”, tetapi untuk membentuk standar internal tentang Muslim yang ideal. Dengan kata lain, ideologi bekerja melalui diferensiasi intra-komunitas, bukan melalui oposisi mayoritas–minoritas. Di sinilah letak kebaruan analisis ini: produksi identitas kewarganegaraan berlangsung melalui seleksi internal atas legitimasi keislaman.

Pola moderasi normatif dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa media secara konsisten mempromosikan model Islam yang kompatibel dengan stabilitas nasional dan agenda pembangunan. Secara normatif, moderasi tentu memiliki nilai positif dalam konteks masyarakat plural. Namun, pembahasan kritis diperlukan untuk melihat bagaimana moderasi diartikulasikan.

Dalam praktik diskursif media, moderasi tidak sekadar dipresentasikan sebagai pilihan etis atau teologis, melainkan sebagai prasyarat legitimasi kewarganegaraan. Muslim yang tidak masuk dalam kategori moderat meskipun tidak melanggar hukum berpotensi dipersepsikan sebagai kurang ideal. Di sinilah konsep kewarganegaraan Marshall menjadi relevan. Secara formal, semua warga negara memiliki hak sipil dan politik yang setara.¹⁹ Namun, dalam praktik simbolik media, kesetaraan tersebut dipengaruhi oleh standar normatif yang ditetapkan secara diskursif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga simbolik-kultural. Pengakuan sebagai warga negara yang sah dan setara bergantung pada kesesuaian dengan narasi dominan. Hal ini memperluas argumentasi Kymlicka tentang kewarganegaraan multikultural.²⁰ Jika Kymlicka menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas kultural minoritas, maka dalam konteks mayoritas Muslim Indonesia, persoalannya bukan sekadar pengakuan, melainkan standarisasi internal atas bentuk identitas religius yang diterima secara publik.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bagaimana partisipasi politik berbasis identitas Islam sering dibingkai sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Media cenderung menggunakan istilah seperti “polarisasi”, “mobilisasi massa berbasis agama”, atau “politik identitas” dengan konotasi negatif. Dalam perspektif demokrasi, partisipasi politik berbasis identitas sejatinya merupakan bagian dari hak warga negara. Namun, dalam praktik representasi media, ekspresi tersebut sering dipersepsikan sebagai penyimpangan dari ideal kewarganegaraan yang netral dan rasional.

Pembahasan ini memperlihatkan adanya paradoks dalam demokrasi mediatik. Di satu sisi, media mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Di sisi lain, media

¹⁸ Elizabeth Poole, *Reporting Islam: Media Representations of British Muslims* (London: I.B. Tauris, 2002), h. 45–72.

¹⁹ T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class and Other Essays* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), h. 10–28.

²⁰ Will Kymlicka, *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship* (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 17–36.

membingkai ekspresi identitas religius dalam politik sebagai potensi ancaman. Dengan demikian, kewarganegaraan yang diproduksi adalah kewargaan depolitisasi warga negara ideal adalah mereka yang menahan identitas religiusnya dalam ruang politik.

Temuan ini melengkapi analisis Mietzner dan Muhtadi tentang polarisasi politik di Indonesia. Jika penelitian tersebut menyoroti dampak mobilisasi identitas terhadap fragmentasi sosial, penelitian ini menunjukkan bagaimana media turut memperkuat persepsi tersebut melalui *framing* yang selektif.²¹ Dengan kata lain, media bukan hanya pelapor dinamika politik, tetapi aktor yang membentuk cara publik memaknai partisipasi politik berbasis agama.

Pola kultural-komodifikatif menunjukkan sisi lain dari produksi identitas kewarganegaraan. Ketika Islam direpresentasikan sebagai gaya hidup modern, industri busana, atau tren hijrah selebritas, media menampilkan religiusitas dalam logika pasar. Di sini, identitas Muslim diterima dan bahkan dirayakan, sejauh kompatibel dengan kapitalisme media.

Dalam perspektif teori budaya, fenomena ini sejalan dengan analisis Heryanto tentang komodifikasi identitas dalam budaya populer Indonesia. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi kewarganegaraan: Muslim yang aktif dalam ekonomi kreatif dan industri religius diposisikan sebagai warga negara produktif dan modern.²² Kewarganegaraan diproduksi dalam kerangka partisipasi ekonomi, bukan partisipasi politik.

Implikasinya signifikan. Ketika religiusitas direduksi menjadi komoditas, dimensi kritis dan transformatif agama berpotensi terpinggirkan. Media, sebagai aparatus ideologis, mengintegrasikan simbol keagamaan ke dalam logika kapitalisme, sehingga identitas Muslim yang ideal adalah yang konsumtif dan tidak konfrontatif terhadap struktur ekonomi-politik.

Pembahasan tidak dapat dilepaskan dari struktur material media itu sendiri. Penelitian Tapsell menunjukkan bahwa oligarki media di Indonesia menciptakan hubungan erat antara kepentingan politik dan produksi berita.²³ Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa seleksi narasumber dan arah *framing* sering selaras dengan kepentingan stabilitas politik dan ekonomi.

Dalam perspektif Fairclough, praktik diskursif selalu terhubung dengan praktik sosial yang lebih luas. Representasi Muslim sebagai subjek kewargaan tidak berdiri di ruang hampa, tetapi berada dalam konfigurasi kuasa yang melibatkan negara, pasar, dan elite media.²⁴ Dengan demikian, aparatus ideologis media tidak hanya bekerja pada level simbolik, tetapi juga pada level struktural.

²¹ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): h. 485–492.

²² Ariel Heryanto, *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture* (Singapore: NUS Press, 2015), h. 35–58.

²³ Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution* (Lanham, MD: Rowman S Littlefield, 2017), h. 1–24.

²⁴ Norman Fairclough, *Media Discourse* (London: Edward Arnold, 1995), 55–75; lihat juga Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, 2nd ed. (London: Routledge, 2010), h. 94–130.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

Meskipun pola-pola dominan dapat diidentifikasi, pembahasan juga menunjukkan adanya ambivalensi dalam representasi. Media tidak sepenuhnya homogen dalam memproduksi wacana. Dalam beberapa kasus, terdapat ruang bagi narasi alternatif yang lebih inklusif dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi tidak pernah sepenuhnya total; selalu terdapat celah kontestasi makna.

Dalam kerangka Hall, makna selalu bersifat artikulatif dan terbuka terhadap negosiasi. Namun, dominasi tertentu tetap dapat diidentifikasi melalui frekuensi dan konsistensi pola representasi.²⁵ Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa produksi identitas kewarganegaraan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan konteks sosial-politik.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan integrasi yang lebih sistematis antara teori aparatus ideologis Althusser, teori representasi Hall, dan konsep kewarganegaraan Marshall serta Kymlicka dalam membaca representasi Muslim di media Indonesia. Jika penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada analisis *framing* atau bias pemberitaan, penelitian ini menunjukkan bagaimana *framing* tersebut berfungsi sebagai mekanisme produksi subjek kewargaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penekanan pada diferensiasi internal dalam komunitas mayoritas Muslim sebagai strategi ideologis media. Kedua, analisis tentang bagaimana moderasi diproduksi sebagai standar normatif kewarganegaraan, bukan sekadar nilai etis. Ketiga, identifikasi hubungan antara komodifikasi religiusitas dan produksi kewarganegaraan konsumtif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana Muslim direpresentasikan, tetapi bagaimana representasi tersebut membentuk batas-batas simbolik kewarganegaraan dalam demokrasi Indonesia. Media tampil sebagai institusi yang menentukan siapa yang dianggap warga negara ideal dan dalam kondisi apa identitas religius diterima atau dicurigai.

Pembahasan ini mengarah pada refleksi yang lebih luas tentang kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang publik yang inklusif dan representasi yang adil. Jika media secara konsisten memproduksi kewarganegaraan yang selektif dan kondisional, maka kohesi sosial berpotensi terganggu. Fragmentasi tidak hanya terjadi karena perbedaan identitas, tetapi karena produksi makna yang menegaskan batas-batas legitimasi.

Oleh karena itu, literasi media menjadi agenda penting. Publik perlu menyadari bahwa representasi adalah konstruksi, bukan realitas yang objektif. Media, sebagai aparatus ideologis, memiliki kekuatan besar dalam membentuk kesadaran kolektif. Kesadaran kritis terhadap praktik diskursif menjadi syarat untuk menjaga demokrasi tetap substantif, bukan sekadar prosedural.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa representasi Muslim dalam media massa merupakan arena strategis dalam produksi identitas kewarganegaraan. Media

²⁵ Stuart Hall, "The Work of Representation," dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: Sage Publications, 1997), h. 15–30.

tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi mengatur batas-batas simbolik tentang siapa yang dianggap warga negara yang sah, ideal, dan diakui. Di sinilah signifikansi penelitian ini: membuka ruang refleksi kritis terhadap relasi antara Islam, media, dan masa depan kewarganegaraan dalam demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa representasi Muslim dalam media massa nasional bukanlah refleksi netral atas realitas sosial, melainkan hasil konstruksi diskursif yang berfungsi secara ideologis. Media beroperasi sebagai aparatus ideologis yang memproduksi dan mereproduksi tipe-tipe identitas kewarganegaraan melalui pola representasi yang terstruktur, selektif, dan berulang. Temuan menunjukkan adanya empat pola dominan, yakni *securitization*, moderasi normatif, politisasi identitas, dan komodifikasi religiusitas. Keempat pola tersebut membentuk standar simbolik tentang Muslim yang dianggap sebagai warga negara ideal. Muslim yang sesuai dengan narasi moderasi, stabilitas, dan kompatibilitas pasar diposisikan sebagai subjek kewargaan yang legitim. Sebaliknya, ekspresi identitas yang dipersepsikan menyimpang dari norma dominan cenderung ditempatkan dalam posisi ambivalen atau problematik. Dengan demikian, kewarganegaraan dalam konteks ini tidak semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga simbolik-kultural. Media memainkan peran sentral dalam menentukan batas-batas legitimasi identitas religius dalam ruang publik demokratis. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi analisis representasi dengan teori aparatus ideologis dan konsep kewarganegaraan, sehingga memperlihatkan bagaimana produksi makna media berimplikasi langsung pada konstruksi subjek kewargaan. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan literasi media dan etika representasi guna mendorong terbentuknya kewarganegaraan yang inklusif, reflektif, dan substantif dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel Heryanto. (2015). *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*. Singapore: NUS Press.
- Edward W. Said. (1997). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, rev. ed. New York: Vintage Books.
- Edward W. Said. (1997). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, rev. ed. New York: Vintage Books.
- Elizabeth Poole. (2002). *Reporting Islam: Media Representations of British Muslims*. London: I.B. Tauris.
- Engin F. Isin dan Bryan S. Turner, (2002). *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publications.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

Media sebagai Aparatus Ideologis: Representasi Muslim dan Produksi Identitas Kewarganegaraan - Fresyam Antika Ajeng

- Kikue Hamayotsu, (2013). "The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.780472>
- Louis Althusser. (1971). "Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation)," dalam *Lenin and Philosophy and Other Essays*, trans. Ben Brewster. New York: Monthly Review Press.
- Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review* 42, no. 3. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Merlyna Lim. (2017). "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Norman Fairclough. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Ross Tapsell. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Stuart Hall. (1997). "The Work of Representation," dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- T. H. Marshall, (1950). *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tariq Modood dan Nasar Meer. (2009). "Refutations of Racism in the 'Muslim Question'," *Patterns of Prejudice* 43, no. 3–4. <https://doi.org/10.1080/00313220903109250>
- Will Kymlicka. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.